

BUKU I

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2017



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



WALIKOTA SURAKARTA

LEMBAR PERNYATAAN

Mengingat karakteristik khusus wilayah Kota Surakarta yang harus diungkap dan dijadikan sebagai pertimbangan serta data dasar bagi penyusunan kebijakan di masa mendatang, maka bersama ini saya sebagai Walikota Surakarta menyatakan bahwa isu prioritas lingkungan hidup daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Surakarta dan hasil perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah dapat saya pertanggungjawabkan.

Surakarta, 28 November 2017
WALIKOTA SURAKARTA

E.A. HADI RUDYATMO



WALIKOTA SURAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Surakarta, sehingga penyusunan buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta 2017 dapat diselesaikan.

Laporan IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Laporan IKPLHD ini merupakan gambaran berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta selama tahun 2017. Laporan ini berisikan pendahuluan, isu lingkungan hidup strategis, dan analisis Pressure, State, Response terhadap isu lingkungan hidup daerah, inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan penutup. Laporan ini memegang peranan penting sebagai bahan terpercaya untuk evaluasi dan pengelolaan lingkungan menuju lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Dengan tersusunnya Laporan IKPLHD Kota Surakarta tahun 2017, diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan visi Kota Surakarta serta bermanfaat untuk semua pihak sehingga dapat meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terkait atas dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam pembuatan laporan ini.

Surakarta, 28 November 2017

WALIKOTA SURAKARTA



F.X. HADI RUDYATMO

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman sampul depan | i |
| Lembar pernyataan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Ringkasan Eksekutif | 1 |
| A. Profil Lingkungan Hidup Surakarta | 2 |
| B. Tataguna Lahan | 3 |
| C. Pencemaran Air dan Udara | 5 |
| D. Penanggulangan Bencana | 8 |
| E. Permasalahan Perkotaan | 10 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setiap wilayah akan memiliki permasalahan lingkungan yang khas, umumnya didorong oleh : kondisi alami wilayah, aktivitas antropogenik dominan, regulasi lingkungan hidup dan level kepedulian komunitas lokal pada lingkungan. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan tekanan terhadap lingkungan dan respons yang dimunculkan oleh pemangku lingkungan lokal.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan pada pasal 28H (1) mengenai hak warganegara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perhatian pemerintah Indonesia pada permasalahan lingkungan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan daerah (IKPLHD) secara langsung berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan pengelolaan lingkungan lokal. Dokumen tersebut merupakan wujud dari inventarisasi lingkungan yang setidaknya akan mencakup potensi lokal, pemanfaatan, tekanan dan respon pengelolaan. Penyusunan dokumen tersebut menjadi tugas dan wewenang bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pasal 63 ayat (3) UUPH. Menurut UUPH pasal 5 inventarisasi lingkungan merupakan bagian integratif dari perencanaan pengelolaan lingkungan. Dokumen IKPLHD merupakan akses informasi publik bagi masyarakat untuk turut mengetahui kondisi dan permasalahan aktual yang dihadapi oleh lingkungan perkotaannya.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Surakarta tahun 2017 disusun berdasarkan pedoman Nirwasita Tantra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Metode analisis yang digunakan adalah pressure, state dan response. Dokumen ini telah memuat isu prioritas lingkungan hidup Kota Surakarta yang dirumuskan dan ditetapkan melalui proses partisipatif dalam FGD Isu Prioritas Lingkungan Hidup Surakarta tanggal 28 September 2017.

A. Profil Lingkungan Hidup Surakarta

Kota Surakarta terletak pada 110°45'15" dan 110°45'35" bujur timur dan antara 7°36' dan 7°56' lintang selatan. Surakarta merupakan kota besar di koridor Jawa Tengah-Yogyakarta selain Semarang dan Kota Yogyakarta. Data pada tahun 2016 menunjukkan jumlah penduduk Surakarta 514.171 jiwa dengan rasio pertumbuhan tahunan 0,460%. Meskipun demikian, nyatanya Surakarta tidak memiliki wilayah administratif yang luas. Keseluruhan luas Surakarta adalah 44,04 km² membuat pengembangan industri peruntukan menjadi jenuh dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Data pada Surakarta Dalam Angka (2017) mendeskripsikan penggunaan lahan kota adalah untuk pemukiman (65%) dan kegiatan perekonomian (16%). (Badan Pusat Statistik, 2017).

Posisi strategis Surakarta menjadikan kota ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah khususnya pada bagian selatan. Aktivitas dominan di Surakarta adalah perdagangan, jasa dan pariwisata yang diselaraskan dengan cita-cita Surakarta menjadi kota MICE (meeting, incentives, convention and exhibition) dan kota budaya.

Peran dan status Surakarta masa lampau dan kini tidak berubah signifikan. Kota Surakarta masih menjadi pusat kegiatan dan pelayanan bagi wilayah hinterland yang kesatuannya dikenal sebagai Subosukowonosraten atau Greater Solo. Hal ini selaras dengan pesatnya pembangunan dan investasi di Surakarta ditunjang semakin beragam dan lengkapnya sarana dan fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini tentunya akan memberikan dua sisi dampak bagi Surakarta, pada sisi negatif tekanan lingkungan yang diterima akan semakin membesar.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Surakarta (IKLH) tahun 2016 menunjukkan angka 43,49 berkategori waspada. Faktor utama kekurangan Kota Surakarta adalah terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH), hanya 9,72%, ditandai dengan nilai indeks tutupan vegetasi (ITV) 31,33 berkategori waspada, lebih rendah dari indeks pencemaran air (IPA) memiliki nilai 42,00 (waspada) dan indeks pencemaran udara (IPU) 61,20 (kurang). Meskipun memiliki kategori waspada, IKLH Surakarta telah **berhasil melampaui target**

yang disasar dalam RPJMD 2016-2021 dan **lebih baik** dibandingkan kondisi sebelumnya pada seluruh komponen.

Isu prioritas lingkungan yang ditentukan secara partisipatif menjadikan kondisi IKLH dan parameter penyusunnya sebagai pertimbangan utama, selain tentunya aktualisasi dan urgensi isu. Pertimbangan lainnya dalam pemilihan isu tentunya disesuaikan dengan pedoman isu prioritas Nirwasita Tantra. Hasil dari perumusan isu prioritas bersama stakeholder menentukan lima isu prioritas untuk ditampilkan dalam IKPLHD yaitu : banjir, sampah, optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau (RTH), pencemaran udara&air dan peningkatan kapasitas budaya peduli lingkungan. Isu tersebut mewakili aspek holistik dalam masalah lingkungan yang harus mencakup komponen penyusunnya : abiotik, biotik dan kultural.

B. Tataguna Lahan

Keseluruhan bentang lahan Surakarta didominasi daratan dengan beberapa badan air tawar berupa sungai-sungai kecil. Surakarta tidak memiliki waduk, danau dan tidak terletak berbatasan dengan kawasan laut, sehingga tidak memiliki ekosistem yang berasosiasi dengan bentang lahan tersebut. Pressure tataguna lahan Kota Surakarta pada dasarnya akan berkaitan dengan ketimpangan laju kebutuhan lahan dengan ketersediaannya. Berikut adalah detail pressure tersebut :

1. Belum terkoneksi penataan ruang dengan pembangunan sektoral.
2. Laju pertumbuhan kawasan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi yang seiring dengan terjadinya kesenjangan antarwilayah dan menurunnya daya dukung kawasan pusat kota (CBD)
3. Posisi geografis dan geoekonomi Surakarta yang strategis sebagai pusat kegiatan bagi kawasan Subosukowonosraten atau hinterland
4. Kondisi demografis Surakarta yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah meskipun memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah ketiga di provinsi.

Salah satu dampak ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan adalah keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) Surakarta. Inventarisasi tahun 2015 menunjukkan luasan RTH Surakarta adalah 9,72%. Angka tersebut hanyalah dari perhitungan RTH publik karena RTH privat dipandang masih berada di

wilayah “abu-abu” dan berfluktuasi cepat, sehingga tidak memiliki dasar kuat untuk ditetapkan sebagai bagian luasan keseluruhan RTH. Surakarta, meskipun tidak memiliki RTH besar, telah menyediakan hutan kota yang penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta.

Tinjauan terhadap perubahan peruntukan lahan 2012-2016 menunjukkan penurunan dan penambahan luas pada beberapa peruntukan lahan. Data menunjukkan bahwa persentase penambahan peruntukan lahan terbesar adalah untuk pengembangan jasa (1,77%), perdagangan (0,46%) dan pemukiman (0,30%). Persentase penurunan peruntukan lahan terbesar adalah pada pertanian lahan kering (11,09%), persawahan (4,09%) dan lahan kosong (4,09%).

Cagar budaya dan kawasan iptek merupakan kategori kawasan lindung yang ada di Kota Surakarta, dengan luasan hanya 2% dari keseluruhan wilayah administratif. Cagar budaya di Surakarta menjadi salah satu karakter atau ciri khas wilayah yang saat ini dikembangkan sebagai primadona pariwisata lokal. Regulasi tentang kawasan Cagar Budaya Surakarta ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 646/1-R/1/2013 yang mengubah keputusan sebelumnya pada tahun 1997. Regulasi tersebut mencantumkan 4 kompleks kawasan, 7 bangunan rumah tradisional, 18 bangunan umum kolonial, 7 bangunan peribadatan, 24 gapura, tugu, monumen atau perabot jalan serta 8 ruang terbuka atau taman yang tergolong sebagai cagar budaya tangible di Surakarta. Terdapat dua kawasan yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional di sektor pariwisata sesuai Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 yaitu Kampung Batik Laweyan dan Keraton Surakarta.

Respon utama pada permasalahan dan pengelolaan tataguna lahan Surakarta adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah Surakarta 2011-2031 yang ditampilkan eksplisit pada Peraturan Daerah (Perda) Surakarta No 1 tahun 2012. Deskripsi tersebut diperkuat dan ditegaskan dengan rilis peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui Perda Surakarta No 10 tahun 2015. Pengelolaan RTRW Surakarta mendeskripsikan adanya pengembangan RTH publik secara bertahap pada kawasan sempadan sungai dan resapan air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung setempat. Regulasi tersebut telah

mencantumkan kewajiban penyediaan RTH untuk bangunan privat, bangunan usaha dan bangunan fasilitas pelayanan publik

Respon Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta bersama masyarakat terhadap terbatasnya RTH melalui aksi tamanisasi dengan membangun taman baru atau meningkatkan kondisi taman lama. Sayangnya, program tersebut masih dinilai kurang pada tahapan perawatan kondisi taman. DLH Surakarta melakukan aksi nyata dalam menambah kualitas RTH yang ada melalui kegiatan penghijauan dengan melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut juga diinisiasi oleh instansi pemerintah, swasta, akademisi hingga komunitas masyarakat yang pada 2016 keseluruhan kegiatan penghijauan berhasil menanam 28.559 batang pohon beraneka jenis. Pemerintah Kota Surakarta berupaya melakukan reduksi pemukiman kumuh melalui program penataan maupun pembangunan rumah deret layak huni. Program tersebut secara langsung memberikan multiple effect positif bagi penyelesaian ragam masalah lingkungan Kota Surakarta.

C. Pencemaran Air dan Udara

Pencemaran menjadi masalah jamak bagi seluruh kawasan perkotaan dunia, khususnya pada matra air permukaan. Pressure utama pencemaran air Surakarta adalah pertumbuhan populasi penduduk diikuti oleh ragam dan intensitas aktivitas antropogenik di dalamnya. Beberapa faktor pressure lainnya meliputi :

1. Tekanan besar cemaran domestik dan industri/kegiatan jasa
2. Penegakan regulasi lingkungan yang dipandang masih lemah dan kurang tegas dalam pelaksanaannya
3. Keterbatasan sarana pengolah limbah cair terutama pada industri kecil sebagai industri utama di Kota Surakarta
4. Peralatan pemantauan beserta analisis air yang masih terbatas dan dianggap belum bertaraf modern
5. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam upaya menjaga dan mengelola kualitas air

Tekanan utama pada pencemaran udara tidak jauh berbeda dengan air. Secara garis besar didorong oleh peningkatan populasi sekaligus aktivitas antropogenik. Surakarta terbebani pula oleh status sebagai pusat kegiatan dan layanan bagi kawasan hinterland-nya yang ditandai intensitas tinggi dari komuter. Ketika

mayoritas komuter masih menggunakan kendaraan pribadi, maka wilayah Surakarta akan terbebani oleh buangan emisi kendaraan bermotor (transportasi jalan raya). Berikut adalah faktor tekanan bagi pencemaran udara Surakarta

1. Tren peningkatan signifikan pada kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi di Surakarta maupun kawasan hinterland-nya
2. Intensitas komuter tinggi
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam upaya mengurangi emisi perkotaan, khususnya sektor transportasi
4. Keterbatasan luasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai pengendali alami emisi karbon dan partikulat
5. Belum tersedianya sarana monitoring kualitas udara

Indeks Pencemaran Air Surakarta berkategori waspada. Hal ini ditandai dengan tercemarnya air sungai di Surakarta pada kategori cemar ringan-cemar sedang (uji kualitas air sungai 2016). Indikasi parameter pencemaran menunjukkan dominasi limbah domestik yang diasumsikan muncul sebagai akibat masih adanya pemukiman bantaran sungai yang belum memiliki sarana pengolahan limbah (SPAL) ideal. Tinjauan dari sarana sanitasi menunjukkan 67% telah memiliki toilet sendiri, 22% memanfaatkan toilet bersama dan 11% dengan toilet umum.

Indeks Pencemaran Udara Surakarta berkategori kurang. Pada kelompok tersebut diindikasikan dengan kualitas yang cenderung menurun dengan munculnya peningkatan sumber emisi. Meskipun demikian, uji udara ambien 2016 menunjukkan keseluruhan nilai parameter uji (NO_2 dan SO_2) masih di bawah baku mutu. Surakarta merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan inventarisasi emisi pada 2014. Hasil inventarisasi emisi menunjukkan kontributor emisi utama pada 6 parameter dihitung (NO_x , SO_x , NMVOC, PM_{10} , CO dan CO_2) adalah transportasi jalan raya dengan komposisi >80% di semua parameter kecuali PM. Adanya hasil uji ambien dan inventarisasi emisi memberikan kesiapan Surakarta untuk menentukan status mutu udara lokal berikut aksi pengelolaan kualitas udaranya.

Terkait kualitas udara, salah satu state sekaligus pressure adalah masih dominannya penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor. Pendataan

2016 menunjukkan penjualan jenis bensin di Surakarta mencapai 108.720 kL sementara solar mencapai 22.362 kL. Untuk konsumsi domestik, keseluruhan masyarakat Surakarta telah mengkonversi bahan bakarnya ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dianggap cukup ramah lingkungan.

Respon terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan kualitas air maupun udara dilandasi oleh ketentuan hukum Perda Surakarta No 10 tahun 2015. Respon aksi yang konsisten dilakukan oleh instansi terkait adalah pemantauan rutin pada kualitas air dan udara. Khusus untuk kualitas udara, selain dilakukan uji udara ambien oleh DLH Surakarta, juga dilakukan uji emisi sporadis (spot check) oleh Dinas Perhubungan untuk emisi kendaraan bermotor pada jalur-jalur strategis pusat kota. Hal ini melengkapi uji kir yang menjadi kewajiban beberapa kategori kendaraan yang telah dilakukan secara konsisten oleh Dishub menggunakan peralatan terbaru.

Upaya respon terhadap pencemaran air dilakukan pula oleh DLH Surakarta dengan pengawasan, pemantauan dan pembinaan pelaku usaha. Selain itu, DLH Surakarta konsisten melaksanakan syarat dan pelaksanaan administrasi dan teknis pencegahan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pada pembangunan fisik dan persepsi lingkungan masyarakat, Pemerintah Surakarta secara bertahap membangun IPAL komunal, meningkatkan sarana sanitasi, melaksanakan Prokasih (Program Kali Bersih), pembangunan rumah deret dilengkapi sarana IPAL, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan menjalin kerjasama seperti yang telah telaksana dengan IUWASH.

Pemerintah Kota Surakarta secara khusus berkomitmen untuk mengubah persepsi masyarakat pada sungai dari persepsi lawas yang memandang sungai sebagai halaman belakang menjadi paradigma baru menempatkan sungai sebagai beranda depan rumah yang wajib ditata dan dirawat dengan baik. Hal ini telah dimulai dengan menjadikan Kali Pepe sebagai wisata air terutama pada even-even tertentu. Sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, pemerintah melaksanakan beragam kegiatan seperti bersih sungai dan balap perahu untuk membangkitkan kepedulian masyarakat Surakarta terhadap pengelolaan sungai.

Respon pencemaran udara oleh DLH Surakarta adalah pelaksanaan uji ambien dan uji kualitas udara sporadis ke berbagai aktivitas (khususnya industri)

yang ada di Surakarta. Sebagai catatan bahwa Surakarta tidak memiliki banyak aktivitas industri besar yang potensial menyumbang emisi. Oleh sebab itu respon pemerintah kota untuk mengatasi pencemaran udara banyak difokuskan pada sektor transportasi jalan raya. Upaya tersebut diwujudkan dengan pengadaan dan pembangunan beragam fasilitas fisik meliputi :

1. Pengadaan transportasi massal modern yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat berwujud Batik Solo Trans (BST)
2. Pengadaan kendaraan feeder (penyuplai) yang menyokong operasional BST khususnya bagi penumpang di jalur-jalur minor yang tidak terakses oleh BST dengan mengoptimalkan angkot baru maupun yang telah ada.
3. Pembangunan jalur pedestrian yang berkelas internasional dan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki maupun pesepeda
4. Pembangunan koneksi intermoda dengan penyediaan halte-halte bus BST pada terminal moda transportasi lainnya seperti stasiun dan bandara serta pembangunan Skybridge sebagai penghubung antara Stasiun Balapan dan Terminal Bus Tirtonadi

D. Penanggulangan Bencana

Faktor pressure kebencanaan Surakarta ditentukan oleh dua bagian besar yaitu alam dan aktivitas antropogenik. Tinjauan faktor alam menunjukkan wilayah Surakarta adalah kawasan rawan bencana banjir dan longsor. Perbedaannya adalah pada banjir lebih berupa kawasan akibat adanya cekungan dan muara sungai-sungai kecil ke Bengawan Solo, sedangkan untuk tanah longsor adalah berupa titik atau spot di beberapa bagian kota, khususnya di kawasan utara Surakarta. Faktor alam lain yang mendorong bencana adalah terjadinya fenomena perubahan iklim dan teknologi pengendali seperti drainase telah melampaui daya tampungnya. Faktor pressure antropogenik terhadap kebencanaan Surakarta adalah :

1. Rencana pembangunan dan penanggulangan bencana terkesan belum terintegrasi
2. Sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang belum handal dan seringkali terhambat oleh keterbatasan dana

3. Kesiapan dan ketangguhan masyarakat dalam mitigasi bencana masih kurang
4. Wawasan dan persepsi masyarakat pada lingkungan masih rendah

Jenis bencana yang terjadi di Surakarta pada tahun 2016 adalah banjir (dua kali pada Juni dan Oktober) serta kebakaran pemukiman atau bangunan. Banjir Surakarta menurut catatan Bappeda menyebabkan 25.194 jiwa mengungsi. Sayangnya, belum dilakukan pencatatan secara mendetail terkait luasan bencana banjir, kerugian material dan peristiwa banjir genangan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Surakarta 2016-2021, luasan kawasan bebas banjir pada 2015 adalah 90%. Sementara itu, untuk bencana kebakaran menunjukkan tren yang menurun pada 2012-2016.

Sebagai penanggulangan bencana lingkungan, menjadi kewajiban pelaku usaha untuk melengkapi dokumen lingkungan baik berupa AMDAL, UKL-UPL, DPLH, DELH dan SPPL. pada tahun 2016 terdapat 66 dokumen izin lingkungan yang bersumber dari penyusunan dokumen secara lengkap dan sesuai aturan serta telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sejumlah 49 dokumen (74,2%) berupa UKL UPL. Sisanya adalah DPLH 10 dokumen (15,1%), AMDAL 5 dokumen (7,6%) dan lainnya adalah DELH serta kelayakan lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen (3,1%). Berdasarkan kegiatan, rekomendasi izin yang diajukan didominasi oleh pembangunan rumah sakit atau fasilitas kesehatan (16%) perhotelan (12%), toko modern (12%), dan fasilitas telekomunikasi (10%). Berdasarkan data DLH Surakarta, pada tahun 2016 terdapat 5 izin pengelolaan limbah B3 yang dirilis, berupa tempat pembuangan sementara. Mayoritas diantaranya (60%) bersumber dari kegiatan atau jenis usaha kesehatan baik berupa rumah sakit maupun klinik. Sisanya adalah dari fasilitas komersial/perdagangan dan perhotelan.

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta adalah memperkuat aspek mitigasi dan kesiapan bencana. Salah satu bagian kegiatan tersebut dengan penyusunan peta rawan bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah Kota Surakarta juga merilis Perda No 7 tahun 2013 sebagai arahan upaya penanggulangan bencana. Sebagai upaya mengurangi potensi kejadian, pemerintah melalui instansi terkait melakukan pembangunan dan restorasi fasilitas

pengendali seperti normalisasi sungai, drainase hingga talud sungai. Respon penanggulangan bencana banjir secara alamiah turut diupayakan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui optimalisasi, pengembangan dan penambahan ruang terbuka hijau dan resapan air. Pada aspek masyarakat, upaya respon bencana dilakukan melalui program pemberdayaan seperti Prokasih dan Kampung Iklim, perubahan persepsi masyarakat dan pembentukan masyarakat tangguh bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surakarta.

E. Permasalahan Perkotaan

Permasalahan perkotaan di Surakarta adalah sampah dan kemiskinan. Pressure utama permasalahan sampah adalah jumlahnya yang terus bertambah sementara fasilitas penampungannya di Surakarta yaitu TPA Putri Cempo telah melampaui kapasitas maksimumnya bahkan sejak 10 tahun lampau. Beberapa faktor pressure lainnya

1. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan populasi
2. Rendahnya budaya masyarakat untuk mengelola sampah termasuk kemampuan dalam menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle)
3. Keterbatasan penggunaan teknologi pengelolaan sampah baik pada tingkatan tempat pembuangan sementara maupun TPA Putri Cempo yang masih mengandalkan metode open dumping
4. Komitmen petugas pengambil sampah

Kemiskinan adalah masalah yang banyak terjadi di perkotaan khususnya negara berkembang akibat adanya kesenjangan. Kemiskinan yang tidak teratasi dan terkelola akan mengakibatkan munculnya masalah lanjutan, termasuk pemukiman kumuh. Berikut adalah faktor pressure pada permasalahan kemiskinan di Kota Surakarta

1. Kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan
2. Kesempatan memperoleh penghidupan layak akibat keterbatasan skill dan kesempatan
3. Keterbatasan akses pada pemukiman yang layak huni

Data tahun 2016 dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta menunjukkan jumlah timbulan sampah 299.405 kg/hari. Persentase penanganan sampah mencapai 100% artinya seluruh sampah terangkut ke TPA Putri Cempo, tidak ada

pembakaran dengan adanya regulasi restriksi oleh pemerintah. Rasio penyediaan tempat sampah per satuan penduduk mencapai 2,5. Untuk komposisi sampah didominasi oleh sampah organik (61,95%), plastik (13,39%) dan kertas (12,26%).

Tren masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surakarta terus mengalami penurunan pada periode 2012-2016. BPS Surakarta mencatat pada tahun 2016 terdapat 55910 jiwa untuk kategori MBR atau setara 10,88%. Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Surakarta terus mengalami peningkatan hingga mencapai 80,76 pada 2016 yang masuk dalam tiga besar tertinggi di Jawa Tengah. Hal tersebut mengindikasikan peluang besar pada keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Surakarta di masa depan. Penurunan jumlah MBR berkorelasi positif dengan luasan kawasan kumuh. Kawasan kumuh di Surakarta mengamai tren selaras yaitu menurun pada periode 2011-2015 dan mencapai angka 8,16% pada tahun 2015.

Respon Pemerintah Kota Surakarta pada permasalahan sampah difokuskan untuk mengatasi timbunan sampah TPA Putri Cempo sebab hampir tidak ada peluang penambahan luasan akibat keterbatasan lahan. Solusi dipastikan pada tahun 2016 dengan penandatanganan kontrak pengelolaan sampah pihak ketiga melalui pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Pemanfaatan tersebut dioperasikan pada 2019 dan diasumsikan akan mengurangi timbunan sampah secara cepat dan signifikan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah salah satu aspek terpenting keberhasilan reduksi jumlah dan dampak negatif sampah. Pada tingkatan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Surakarta menginisiasi dan memfasilitasi berdirinya bank sampah. Data terbaru hingga dokumen ini tersusun, telah terdapat setidaknya 100 unit bank sampah di Surakarta. Sayangnya, pendataan terhadap jumlah sampah dikelola dari masing-masing bank sampah belum terlaksana akibat tidak tersedianya bank sampah sentral. Saat ini, bank sampah diselenggarakan oleh komunitas lokal termasuk PKK secara sporadis.

Sebagai suntikan moral dan menambah daya tarik pada pengelolaan sampah, pemerintah berinisiatif melakukan pelatihan berkaitan dengan konsep 3R (reduce, reuse dan recycle) beserta akses pemasaran produknya. Pemerintah kota melalui DLH Surakarta menargetkan produk olahan 3R dapat dipasarkan untuk

melengkapi industri kreatif Surakarta pada hotel-hotel dan sarana jasa lainnya di Surakarta.

Pada aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta telah merilis Perda No 3 Tahun 2010 yang mencakup pengelolaan persampahan. Pemerintah Kota Surakarta memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana memudahkan masyarakat untuk menangani sampah yaitu e-retribusi sebagai akses kemudahan membayar dan transparansi retribusi sampah.

Respon dalam penanganan kemiskinan berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar MBR termasuk ketersediaan akses dan kemudahan pada layanan seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Surakarta telah menyediakan jaminan kesejahteraan sosial. Terkait dengan pemukiman layak huni, pemerintah kota telah membangun fasilitas berupa rumah susun sewa (rusunawa), rumah susun milik (rusunami) hingga rumah deret yang telah dilengkapi sarana sanitasi dan pengolahan limbah (IPAL) memadai. Pemerintah Surakarta juga melakukan program penataan kampung-kampung yang terkesan kumuh menjadi tertata dan dilengkapi dengan fasilitas layanan dan pengolahan limbah domestik memadai.

Berdasarkan paparan pada masing-masing aspek permasalahan lingkungan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama pendorong permasalahan lingkungan Kota Surakarta adalah kepadatan penduduk dan peningkatan intensitas serta ragam aktivitas antropogenik. Hal tersebut ironisnya tidak diikuti dengan persepsi dan budaya lingkungan yang memadai dari masyarakatnya. Respon yang diambil Pemerintah Kota Surakarta untuk menanggulangi permasalahan lingkungan adalah melalui mitigasi guna mempersiapkan perencanaan dan pengelolaan holistik dengan diperkuat oleh adanya regulasi yang mengikat dan tegas. Pemerintah Kota Surakarta juga berupaya memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagai langkah untuk membentuk persepsi, budaya dan kepedulian lingkungan yang baik sehingga akan memunculkan kemauan mandiri dari masyarakat untuk turut menjaga, melestarikan dan mengelola lingkungan.

Kajian dokumen IKPLHD ini menunjukkan bahwa sejauh ini Pemerintah Surakarta telah cukup berhasil mengelola lingkungan kota melalui program yang dilakukan. Hal tersebut diindikasikan secara kuantitatif dan kualitatif pada review

kondisi lingkungan (state) terkini. Secara kuantitatif indikasi utama hal tersebut adalah peningkatan nilai IKLH secara signifikan dan telah melampaui target tahunan yang dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021. Indikator kuantitatif lainnya adalah penurunan angka beberapa permasalahan lingkungan seperti jumlah MBR, kawasan kumuh dan kejadian bencana kebakaran. Indikator kualitatif berwujud pada meningkatnya peranserta masyarakat pada beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan serta tingkat ketaatan untuk memenuhi syarat pelaksanaan dan administrasi dokumen lingkungan.

Bukti keberhasilan juga dapat dinilai dari penghargaan yang telah diterima Pemerintah Kota Surakarta pada berbagai tingkatan. Penghargaan menjadi indikasi bahwa program yang dijalankan mendapatkan respek dan respon positif dan telah mampu membawa perubahan nyata pada lingkungan masyarakat yang menjalankannya. Penghargaan tersebut yang terbaru antara lain Juara I Kampung Iklim tingkat Nasional untuk RW 09 Kadipiro (2016) dan Adipura Kecana (2016). Selain itu, Surakarta juga telah berhasil memiliki dan membina beberapa Sekolah Adiwiyata berlevel lokal, provinsi hingga nasional.

Belum seluruh program menunjukkan keberhasilan nyata. Adapun beberapa menunjukkan kondisi konstan atau bahkan menurun. Penyediaan RTH sebagai contohnya merupakan permasalahan khas wilayah perkotaan dengan luasan sempit. Pencemaran yang senantiasa muncul dan meningkat pada perkotaan modern akan cukup sulit ditangani secara segera karena melibatkan proses menahun. Banjir merupakan isu prioritas yang hanya dapat dipersiapkan mitigasinya dan ditanggulangi melalui kesiapan dan ketangguhan pasca kejadian akibat pengaruh faktor alam di dalamnya. Namun, setidaknya saat ini pemerintah kota Surakarta telah mempersiapkan respon mitigasi dan adaptasi yang tepat untuk menangani atau setidaknya meminimalisasi dampak dari setiap permasalahan lingkungan.

Evaluasi nyata dapat disampaikan secara singkat melalui ungkapan “lebih mudah mencapai daripada mempertahankan”. Membangun sebuah sarana, fasilitas hingga program akan bergantung pada kemampuan SDM dan ketersediaan sumber daya pendukung termasuk pendanaan. Namun, mempertahankan agar fasilitas tersebut dapat terus berfungsi optimal adalah tantangan berbeda dengan kemauan

dan kesiapan menjadi faktor penentu utamanya. Modernisasi teknologi tetap menjadi kebutuhan wajib untuk dipenuhi termasuk didalamnya penyediaan alat pantau, monitoring, analisis dan pengelolaan dengan pendekatan modern. Pemanfaatan teknologi komunikasi yang pesat harus dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan, pengelolaan dan komunikasi publik terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.